

PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Lindawati Harsono

Jesica Handoko

Ika Fransisca

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

linda_orange_90@yahoo.com

Abstract

Since 2007, limited companies in Indonesia have responsibility to implement corporate social responsibility as stipulated in the law No. 40/ 2007 regarding the limited companies. Social responsibility which has been implemented will be disclosed, one way of disclosure is through sustainability report. This study was conducted to examine the influence of type of industry, firm size and managerial ownership on the level of corporate social responsibility disclosure. Samples of this research consist of 18 companies which joined Indonesia Sustainability Reporting Awards in 2008-2010 and published sustainability reports. The results of this study indicate that individually, type of industry variable and company size variable are not significantly influence on the level of social responsibility disclosure. Individually, managerial ownership variable is negatively influence on the level of social responsibility disclosure.

Keywords: Social Responsibility Disclosure Level, Type Of Industry, Firm Size, Managerial Ownership.

Pendahuluan

Dewasa ini, perusahaan diharapkan tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal (investor dan kreditor). Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Akuntansi konvensional tidak relevan untuk kondisi sekarang. Di dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders*. Pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal, sehingga pada awalnya perseroan terbatas melaksanakan tanggung jawab sosial hanya secara sukarela. Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perseroan terbatas di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, oleh karenanya diharapkan tanggung jawab sosial ini dapat makin bertambah besar.

Tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan selanjutnya akan diungkapkan sebagai perluasan dari informasi akuntansi konvensional. Selama

beberapa tahun terakhir ini telah dikembangkan berbagai panduan tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Pada tahun 2006 *Global Reporting Initiative* (GRI) menerbitkan pedoman G3. Subjek pedoman G3 meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Pedoman G3 menjadi kriteria penilaian dan kategori pemenang pada *Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA) tahun 2008-2010. Pada tahun 2010 *International Organization for Standardization* menerbitkan ISO 26000. Subjek dari CSR berdasarkan ISO 26000 meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, konsumen, dan pelibatan serta pengembangan masyarakat. Pada tahun 2011 GRI menerbitkan pedoman G3.1. Pedoman G3.1 merupakan pengembangan lebih lanjut dari pedoman G3. Pedoman G3.1 memperluas pelaporan tentang hak asasi manusia, dampak komunitas lokal, dan gender.

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan tipe industri, perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan dalam industri *high profile* dan perusahaan dalam industri *low profile*. Sembiring (2005), Anggraini (2006) menemukan pengaruh positif tipe industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dalam industri *high profile* akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding industri *low profile* karena operasi perusahaan *high profile* menimbulkan lebih banyak dampak sosial dan lingkungan, dan lebih banyak diawasi oleh pemerintah (Anggraini, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) menunjukkan hasil yang berbeda, tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sembiring (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan besar mungkin memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial dan mendapat tekanan yang lebih besar untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas (Cowen dkk., 1987; dalam Sembiring, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), Nurkhin (2009) menunjukkan hasil yang berbeda, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dalam penelitian-penelitian terdahulu. Anggraini (2006), Muchlish dan Rawi (2010) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial karena manajerial menganggap masyarakat eksternal memperhatikan kegiatan operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan (Muchlish dan Rawi, 2010). Barnea dan Rubin (2005) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh ketiga variabel di atas (tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial memotivasi dilakukannya penelitian sekarang. Data pengungkapan tanggung jawab sosial dapat diperoleh dari laporan CSR dalam laporan tahunan, *website* perusahaan, laporan keberlanjutan, dan lain-lain. Penelitian ini akan menggunakan data pengungkapan tanggung jawab sosial yang diperoleh dari laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan kunci tentang dampak keberlanjutan terkait aktivitas bisnis utama perusahaan dan tindakan strategis yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menanggapi dampak tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan peserta ISRA tahun 2008-2010 yang menerbitkan *sustainability report*. Perusahaan yang menjadi peserta ISRA pada tahun 2008-2010 menerbitkan *sustainability report* berdasarkan pedoman G3. ISRA merupakan suatu penghargaan yang berfokus pada transparansi dan kesesuaian dengan pedoman pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh GRI. Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial menjadi hal yang wajib dilaksanakan bagi perusahaan yang kegiatan utamanya berkaitan dengan sumber daya alam. Regulasi tersebut berdampak signifikan terhadap motivasi untuk pelaporan berkelanjutan (*National Center for Sustainability Reporting*, 2010). Untuk mengetahui apakah setelah ditetapkannya UU No. 40 tahun 2007 telah banyak perusahaan yang termotivasi mengungkapkan tanggung jawab sosial, penelitian ini akan menggunakan data peserta ISRA selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2008-2010.

Pedoman terbaru yang diterbitkan oleh GRI mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial adalah pedoman G3.1. Pelaporan berdasarkan pedoman G3.1 lebih luas daripada pedoman G3. Namun, penelitian ini tidak menggunakan pedoman G3.1 karena pedoman G3 lebih relevan dengan objek penelitian. Pedoman G3 menyediakan indikator-indikator yang mencakup data kualitatif maupun data kuantitatif. Pedoman G3 terdiri atas dua aspek yaitu *core indicators* dan *additional indicators*. *Core indicators* adalah indikator material yang menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan, sedangkan *additional indicators* adalah indikator yang mewakili praktik yang berkembang dan bersifat material hanya untuk organisasi tertentu. Penelitian ini akan menggunakan aspek *core indicators* karena menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan. Total *core indicators* dalam panduan G3 sejumlah 49 indikator. *Core indicators* terbagi dalam enam kategori meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab produk.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan peserta ISRA tahun 2008-2010 yang menerbitkan laporan keberlanjutan.

Rerangka Teori dan Hipotesis

Teori Stakeholder dan Teori Legitimasi

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Muchlish dan Rawi, 2010). Saat ini, pemangku kepentingan atas kegiatan perusahaan bukan hanya pemegang saham dan kreditor namun juga termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas. Teori *stakeholder* mempertimbangkan bahwa harapan dari berbagai pemangku kepentingan berdampak besar terhadap strategi perusahaan. Teori ini berimplikasi pada kebijakan perusahaan untuk mencapai harapan *stakeholder* melalui pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas sosial dan lingkungan (Suaryana, 2011).

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) menyatakan bahwa organisasi secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Perusahaan dapat kehilangan legitimasi jika sistem nilai perusahaan tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat. Hilangnya legitimasi dari masyarakat dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Hidayati dan Murni, 2009). Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mempertahankan legitimasi dari masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefinisikan: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Tanggung jawab sosial pada awalnya dimaknai sebagai tanggung jawab yang bersifat *voluntary*. Sejak ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), tanggung jawab sosial dimaknai sebagai kewajiban yang bersifat *mandatory*. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU No.25 Tahun 2007 pasal 15 huruf b mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Sukarmi (2010), UU No.40 Tahun 2007 dan UU No.25 Tahun 2007 mempunyai tujuan yang sama yaitu mengarahkan tanggung jawab sosial sebagai komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Beberapa lembaga membuat konsep yang berbeda-beda tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. ISO 26000 yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization* mengidentifikasi 7 kategori pengungkapan tanggung jawab sosial meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, konsumen, dan pelibatan serta pengembangan masyarakat. Sedangkan pedoman G3 yang

diterbitkan oleh GRI membagi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 6 kategori meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Penelitian ini menggunakan konsep pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan pedoman G3 karena lebih relevan dengan objek penelitian, yaitu perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* dan menjadi peserta ISRA pada tahun 2008-2010. Perusahaan yang menjadi peserta ISRA pada tahun 2008-2010 menerbitkan *sustainability report* berdasarkan pedoman G3.

Global Reporting Initiative (2006) mendefinisikan *sustainability report* (laporan keberlanjutan) sebagai berikut: "Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal."

Laporan keberlanjutan merupakan dokumen strategik tingkat tinggi yang berisi isu, tantangan, dan peluang dari pembangunan berkelanjutan (Nugrahani, 2009). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, organisasi sebagai bagian dari masyarakat berperan penting untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka (*Global Reporting Initiative*, 2006).

Indonesia Sustainability Reporting Awards

Indonesia Sustainability Reporting Awards adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atas kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pemberian penghargaan ini adalah untuk memotivasi dan mempercepat pelaporan berkelanjutan di Indonesia dengan memberikan penghargaan atas usaha perusahaan dalam mengomunikasikan kinerja perusahaan dalam tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penghargaan berfokus pada transparansi dan kesesuaian pelaporan dengan pedoman pelaporan yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative*.

ISRA pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005. Jumlah peserta ISRA semakin meningkat dari tahun ke tahun, mulai 7 perusahaan pada tahun 2005 hingga menjadi 23 perusahaan pada tahun 2010. Peningkatan jumlah peserta ISRA dan kualitas laporan keberlanjutan menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran perusahaan di Indonesia tentang pentingnya tanggung jawab sosial, terutama pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (*National Center for Sustainability Reporting*, 2010). ISRA memberikan penghargaan untuk *sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan dari berbagai sektor. *Best sustainability report* kelompok A diberikan untuk perusahaan di sektor *agriculture, plantation, mining and basic industry*, dan *chemical*. *Best sustainability report* kelompok B diberikan untuk perusahaan di sektor *various industry, consumer goods, property, dan real estate*. *Best sustainability report* kelompok C diberikan untuk perusahaan di sektor *financial services, infrastructure, utilities, transportation, telecommunication, trading and investment*.

Pengaruh Tipe Industri terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Tipe industri terdiri atas dua kelompok, yaitu industri *high profile* dan industri *low profile*. Perusahaan *high profile* memiliki *consumer visibility*, tingkat risiko politis, dan tingkat kompetisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan *low profile* (Nugrahani, 2009). Selain itu, perusahaan *high profile* lebih banyak diawasi oleh pemerintah dibandingkan dengan perusahaan *low profile* (Anggraini, 2006). Anggraini (2006) mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik sebagai industri *high profile*. Hidayati dan Murni (2009) mengelompokkan industri pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, konstruksi, komunikasi, produksi makanan dan minuman, tembakau dan rokok, kertas, kimia, plastik, mesin, otomotif, farmasi, barang konsumsi, komunikasi sebagai industri *high profile*.

Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high profile* akan mengungkapkan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low profile*. Perusahaan *high profile* memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga akan memberikan informasi sosial lebih banyak untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan (Sembiring, 2005). Mirfazli dan Nurdiono (2007) berpendapat bahwa industri *high profile* memunculkan lebih banyak dampak sosial dibanding industri *low profile* sehingga mereka melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya sebagai bentuk legitimasi atas kegiatan operasi perusahaan. Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Tipe industri berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menentukan besar kecil suatu perusahaan. Muchlish dan Rawi (2010) menilai ukuran perusahaan berdasarkan jumlah nominal aset yang dimiliki perusahaan. Miranti dan Suhardjanto (2009) menilai ukuran Perusahaan berdasarkan logaritma dari total aset. Penelitian ini menilai ukuran perusahaan dengan logaritma dari total aset. Aset dapat merepresentasi ukuran perusahaan baik dari sudut pandang posisi keuangan maupun potensi jasa fisis dan nonfisis yang dimiliki perusahaan. Karakteristik utama aset meliputi manfaat ekonomik di masa datang cukup pasti, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono, 2006:254). Total aset dihitung hasil logaritmanya terlebih dahulu agar variasi antar perusahaan tidak terlalu besar. *Log asset* memberikan hasil yang lebih sesuai untuk pengolahan data.

Perusahaan berukuran besar melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memberi dampak yang lebih besar kepada masyarakat (Cowen dkk., 1987; dalam Miranti dan Suhardjanto, 2011). Hal ini menjadikan perusahaan besar memiliki lebih banyak *stakeholder* daripada perusahaan kecil dan menjadi emiten yang

banyak disoroti. Perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial untuk melegitimasi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan dan untuk memenuhi keinginan para *stakeholder* yang berkepentingan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Kepemilikan manajerial atau yang biasa dikenal dengan istilah *insider ownership* didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004; dalam Muchlis dan Rawi, 2010). Menurut Rustiarini (2010) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Penelitian ini menilai kepemilikan manajerial sebagai persentase kepemilikan oleh direksi atau dewan komisaris. Penilaian ini sesuai dengan kondisi perusahaan di Indonesia secara umum di mana kepemilikan saham oleh *insider* adalah kepemilikan saham oleh direksi atau dewan komisaris. Jumlah kepemilikan saham oleh direksi dan dewan komisaris diungkapkan dalam laporan tahunan.

Kepemilikan manajerial merupakan suatu cara untuk mengatasi konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976, dalam Anggraini, 2006) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara manajerial dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajerial dalam perusahaan semakin kecil. Karena kepemilikan manajerial dalam perusahaan kecil, nilai perusahaan tidak berdampak signifikan pada manajerial. Manajerial akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya konflik kepentingan antara manajerial dengan pemilik menjadi semakin kecil ketika kepemilikan manajerial dalam perusahaan semakin besar. Karena kepemilikan manajerial dalam perusahaan besar, nilai perusahaan akan berdampak signifikan pada manajerial. Manajerial akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial untuk meningkatkan *image* perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dari uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Metoda Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah perusahaan peserta *Indonesia Sustainability Reporting Awards*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan adalah:

Tabel 1. Seleksi Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
	Perusahaan yang menjadi peserta ISRA sampai tahun 2010	23
1	Perusahaan yang tidak menjadi peserta ISRA tahun 2008-2010 berturut-turut	(14)
2	Perusahaan yang tidak <i>listing</i> di BEI selama tahun 2007- 2009 berturut-turut	(1)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2007- 2009 berturut-turut	(0)
4	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan selama tahun 2007- 2009 berturut-turut	(0)
5	Perusahaan yang tidak terdapat kepemilikan manajerial selama tahun 2007- 2009 berturut-turut	(1)
6	Data yang dibutuhkan tidak tersedia	(1)
	Jumlah sampel per tahun	6
	Jumlah sampel keseluruhan 6 x 3 tahun	18

Sumber: IDX 2007- 2009, ICMD 2007-2009, ISRA 2008-2010

Dari hasil seleksi sampel, jumlah sampel keseluruhan adalah 18. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Data Nama Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal <i>Go Public</i>
1	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	23 - 12 - 2002
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	27 - 11 - 1997
3	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	14 - 11 - 1995
4	TINS	PT Timah Tbk	19 - 10 - 1995
5	ASII	PT Astra International Tbk	4 - 4 - 1990
6	JSMR	PT Jasa Marga Tbk	12 - 11 - 2007

Sumber: IDX

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah suatu pengkomunikasian informasi mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan organisasi, peran organisasi dalam menanggulangi dampak tersebut, serta peran organisasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan untuk organisasi, kelompok khusus yang berkepentingan dan untuk masyarakat secara keseluruhan. Informasi ini dapat berupa informasi kualitatif maupun kuantitatif.

Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan menggunakan *checklist* berdasarkan *core indicators* pedoman G3 yang diterbitkan oleh GRI. *Core indicators* terbagi dalam enam kategori meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab produk. Total *core indicators* dalam panduan G3 sejumlah 49 indikator. Tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan diukur dengan memberikan skor pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial yang terdapat pada laporan keberlanjutan perusahaan. Ketentuan pemberian skor tingkat pengungkapan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian skor untuk setiap item pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan pendekatan dikotomis, dimana item yang diungkapkan diberi nilai satu sementara jika item tersebut tidak diungkapkan diberi nilai nol. Skor dari setiap item pengungkapan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.
2. Penghitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial tiap perusahaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CSR_i = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan:

CSR_i : indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

X_i : variabel *dummy*, diberi nilai 1 jika item diungkapkan dan nilai 0 jika item tidak diungkapkan

N : jumlah item yaitu 49 item.

Item-item pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan pedoman G3 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *website Global Reporting Initiative* yaitu www.globalreporting.org. Item-item pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Tipe Industri

Tipe industri adalah pengelompokan perusahaan berdasarkan visibilitas konsumen, risiko politis, dan tingkat persaingan di mana perusahaan beroperasi. Tipe industri terdiri atas dua kelompok:

- Industri *high profile* adalah industri yang memiliki *consumer visibility*, tingkat risiko politis, dan tingkat kompetisi yang tinggi (Nugrahani, 2009). Industri ini memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat.
- Industri *low profile* adalah industri yang memiliki *consumer visibility*, tingkat risiko politis, dan tingkat kompetisi yang lebih rendah daripada industri *high profile*. Industri ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Tipe industri diukur menggunakan variabel *dummy*. Nilai 1 diberikan untuk perusahaan dalam industri *high profile*, meliputi: *agriculture, forestry, fishing, mining and mining service, construction, food and beverages, tobacco manufacturers, paper and allied products, chemical and allied products*,

plastic and glass products, automotive and allied products, pharmaceuticals, consumer goods, telecommunication. Nilai 0 diberikan untuk perusahaan dalam industri *low profile*, meliputi: *animal feed and husbandry, textile mill products, apparel and other textile products, lumber and wood products, adhesive, cement, metal and allied products, fabricated metal products, stone, clay, glass, and concrete products, cables, electronic and office equipment, photographic equipment, transportation service, wholesale and retail trade, banking, credits agencies other than bank, securities, insurance, real estate and property, hotel and travel service, holding and other investment companies, and others.* Data tipe industri diperoleh dari bidang industri di mana perusahaan beroperasi yang dipaparkan pada *Indonesia Capital Market Directory*.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk menentukan besar kecil suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan logaritma dari total aset yang dimiliki perusahaan. Data ukuran perusahaan diperoleh dari neraca yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan.

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah bagian dari struktur kepemilikan di mana organ perusahaan (direksi atau dewan komisaris) sekaligus menjadi pemilik saham. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase dari jumlah saham yang dimiliki direksi atau dewan komisaris dibanding total saham keseluruhan. Data kepemilikan manajerial diperoleh dari ikhtisar saham yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghitung variabel independen yang digurakan dalam penelitian ini yaitu tipe industri, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan menghitung besarnya variabel dependen yaitu indeks tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.
2. Uji asumsi klasik terhadap model regresi meliputi:
 - a. Uji normalitas
Normalitas data diuji dengan menggunakan *Kolmogrov Smirnov Test*. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi data adalah normal, sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.
 - b. Uji autokorelasi
Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan membandingkan nilai DW dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%. Jika $d_U < DW < 4 - d_U$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2005:97).
 - c. Uji multikolinearitas
Multikolineritas dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi terdapat hubungan multikolinearitas jika nilai *tolerance* < 0.10 atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2005:92).

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik plot akan sulit diinterpretasikan karena jumlah pengamatan pada penelitian ini sedikit. Uji statistik lebih dapat menjamin keakuratan hasil (Ghozali, 2005:107). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan variabel bebas tidak ada yang kurang dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3. Membuktikan hipotesis penelitian dengan menggunakan persamaan regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

$$CSR = \alpha + \beta_1 TI + \beta_2 UP + \beta_3 KM + e$$

Keterangan:

CSR : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

α : *Intercept* atau konstanta

β : Koefisien regresi

TI : Tipe industri

UP : Ukuran perusahaan

KM : Kepemilikan manajerial

e : *Error*

4. Penilaian *goodness of fit*

Uji *goodness of fit* bertujuan untuk membandingkan suatu distribusi yang teramati dengan distribusi yang diharapkan (Lind dkk., 2008:276). *Goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali, 2005:83)

- Koefisien determinasi yang disesuaikan

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan variasi dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 meningkat untuk setiap tambahan variabel bebas, bukan karena variabel bebas tambahan tersebut merupakan prediktor yang bagus untuk variabel terikatnya (Lind dkk., 2008:131). Untuk menyeimbangkan dampak tersebut, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*). Nilai *adjusted R²* menunjukkan variasi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dapat dijelaskan oleh variasi tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial.

- Uji statistik F, dengan tingkat keyakinan 95%/ batas nilai signifikan (α) sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tipe industri, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.
- Uji statistik t, dengan tingkat keyakinan 95%, dan $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tipe industri, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Sampel Penelitian

Ringkasan deskripsi data pada 18 perusahaan selama tahun 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 3 dan 4. Nilai rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan pengungkapan tanggung jawab sosial lebih mendekati nilai minimum. Hal ini berarti sebagian besar perusahaan sampel memiliki total aset yang kecil, persentase kepemilikan saham oleh direksi dan atau dewan komisaris kecil, dan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sempit. Tipe industri pada perusahaan sampel terdiri atas 16,7% perusahaan *low profile* dan 83,3% perusahaan *high profile*. Perusahaan sampel sebagian besar adalah perusahaan *high profile*. Selanjutnya tabel 5 menyajikan statistik deskriptif sampel penelitian.

Tabel 3. Tipe Industri Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Bidang Usaha	Tipe Industri	Nilai
1	PTBA	<i>Mining and mining service</i>	<i>High profile</i>	1
2	ANTM	<i>Mining and mining service</i>	<i>High profile</i>	1
3	TLKM	<i>Telecommunication</i>	<i>High profile</i>	1
4	TINS	<i>Mining and mining service</i>	<i>High profile</i>	1
5	ASII	<i>Automotive and allied products</i>	<i>High profile</i>	1
6	JSMR	<i>Others</i>	<i>Low profile</i>	0

Sumber: ICMD, data diolah

Tabel 4. Ukuran dan Kepemilikan Manajerial Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Ukuran (Log Total Aset)		
		2007	2008	2009
1	PTBA	12.594179	12.785816	12.907335
2	ANTM	13.080551	13.010514	12.997386
3	TLKM	13.914125	13.960263	13.989270
4	TINS	12.701802	12.762304	12.686253
5	ASII	13.802910	13.907089	13.949087
6	JSMR	13.141363	13.165623	13.208825
No.	Kode Perusahaan	Persentase Kepemilikan Manajerial		
		2007	2007	2007
1	PTBA	0,017273	0,017273	0,017273
2	ANTM	0,016630	0,016630	0,016630
3	TLKM	0,000115	0,000115	0,000115
4	TINS	0,000397	0,000397	0,000397
5	ASII	0,027517	0,027517	0,027517
6	JSMR	0,039110	0,039110	0,039110

Sumber: Laporan tahunan, data diolah

Tabel 5. Statistik Deskriptif Sampel Penelitian

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
UP	18	12.594179	13.989270	13.253594	.514935
KM	18	.000115	.039164	.015574	.014693

CSR	18	.122449	1	.503401	.296817
Valid N (<i>listwise</i>)	18				

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Low Profile	3	16.7	16.7	16.7
	High Profile	15	83.3	83.3	100.0
	Total	18	100.0	100.0	

Analisis Data

Hasil uji asumsi klasik untuk model regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas 0,988. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan distribusi data adalah normal.
2. Nilai DW dari hasil uji autokorelasi adalah 1,547. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_U untuk $n = 18$, $k = 2$, dan nilai signifikansi 5%. Karena nilai DW lebih besar dari nilai d_U yaitu 1,535 dan kurang dari $4 - d_U$ yaitu 2,465, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
3. Hasil uji Multikolinearitas mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas. Nilai VIF tidak melebihi 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1.
4. Nilai signifikan dari masing-masing variabel bebas tidak kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya adalah melakukan uji *goodness of fit*. Ringkasan hasil pengujian terdapat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.774(a)	.600	.514	.206963

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	.898	3	.299	6.989	.004(a)
	<i>Residual</i>	.600	14	.043		
	<i>Total</i>	1.498	17			

<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	2.528	1.317		1.919	.076
	TI	.222	.157	.286	1.413	.180
	UP	-.155	.102	-.268	-1.517	.152
	KM	-10.136	4.174	-.502	-2.428	.029

- Koefisien Determinasi yang Disesuaikan

Nilai *adjusted R*² sebesar 0,514 yang berarti variabilitas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dijelaskan oleh variabilitas tipe industri, ukuran

perusahaan, dan kepemilikan manajerial sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 48,6% dijelaskan oleh variabel lain selain ketiga variabel bebas dalam penelitian ini.

- Uji Statistik F

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi pada 0,004 yang berarti variabel tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain model penelitian dikatakan *fit*.

- Uji Statistik T

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $CSR = 2.528 + 0,222 TI - 0,155 UP - 10,136 KM + e$

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel tipe industri dan ukuran perusahaan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tipe industri dan ukuran perusahaan secara individual tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial secara individual berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, akan tetapi berlawanan arah dengan yang dihipotesiskan.

Pembahasan

Dari hasil analisis regresi berganda pada penelitian ini diperoleh persamaan dengan nilai konstanta 2,528. Jika variabel bebas dianggap konstan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 2,528. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,514 menunjukkan bahwa variabilitas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dijelaskan oleh tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar ketiga variabel bebas tersebut. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikan 0,004. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh variabel bebas (tipe industri, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) secara individual terhadap variabel terikat (tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial) diketahui melalui uji statistik T. Hasil dari uji statistik T sebagai berikut.

1. Koefisien regresi variabel tipe industri (TI) sebesar 0,222 dan tanda koefisien regresi positif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan *high profile* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial sebesar 0,222 lebih tinggi dari perusahaan *low profile*. Perusahaan *high profile* melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan *low profile*. Nilai signifikansi variabel tipe industri sebesar 0,180. Nilai ini lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Tipe industri bukan merupakan faktor yang menjadi

pertimbangan bagi perusahaan dalam memutuskan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian H1 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Sembiring (2005), Anggraini (2006), Mirfazli dan Nurdiono (2007) yang menemukan pengaruh positif tipe industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Nurkhin (2009) yang tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial karena tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan, serta pengawasan oleh pemerintah tidak hanya berpusat pada perusahaan dengan jenis industri tertentu. Para aktivis sosial dan lingkungan, serta pemerintah akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri *high profile* maupun *low profile* yang tidak berusaha mengendalikan dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menerima tekanan ini akan melaksanakan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya sebagai bentuk legitimasi atas dampak dari kegiatan operasi perusahaan.

2. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (UP) sebesar $-0,155$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh sebesar $0,155$ terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Tanda koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial berlawanan arah. Perusahaan besar melakukan lebih sedikit pengungkapan tanggung jawab sosial daripada perusahaan kecil. Nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar $0,152$. Nilai ini lebih besar dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran perusahaan bukan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam memutuskan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sembiring (2005) yang menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Nurkhin (2009) yang tidak menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena keputusan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial didasarkan pada faktor biaya dan manfaat, bukan pada banyaknya aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan dan banyaknya *stakeholder*.
3. Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (KM) sebesar $-10,136$ menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh sebesar $10,136$ terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Tanda koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan tanggung jawab sosial berlawanan arah. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar melakukan lebih sedikit pengungkapan tanggung jawab sosial daripada perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang kecil. Dengan demikian H3 ditolak. Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial sebesar $0,029$. Nilai ini lebih kecil dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh

signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Anggraini (2006) dan Muchlish dan Rawi (2010) yang menemukan pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Barnea dan Rubin (2005) yang menemukan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar melakukan lebih sedikit pengungkapan tanggung jawab sosial daripada perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih kecil. Menurut Barnea dan Rubin (2005), pemegang saham afiliasi mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih dalam CSR ketika mereka tidak menanggung banyak biaya yang terkait dengan hal tersebut. Manajerial yang memiliki saham secara tidak langsung akan turut menanggung biaya pengungkapan informasi sosial. Pengungkapan informasi sosial akan menambah biaya perusahaan dalam jangka pendek walaupun dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Karena jumlah kepemilikan saham oleh manajerial bersifat tidak permanen, tergantung pada kebijakan perusahaan, maka manajerial akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek dengan mengurangi biaya pengungkapan tanggung jawab sosial.

Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa tipe industri secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini karena para aktivis sosial dan lingkungan, serta pemerintah akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri *high profile* maupun *low profile* yang tidak berusaha mengendalikan dampak sosial dan lingkungan. Ukuran perusahaan secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini karena keputusan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial didasarkan pada faktor biaya dan manfaat, bukan pada banyaknya aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan dan banyaknya *stakeholder*. Kepemilikan manajerial secara individual berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini karena kepemilikan saham oleh manajerial bersifat tidak permanen, tergantung pada kebijakan perusahaan sehingga manajerial akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka pendek dengan mengurangi biaya pengungkapan tanggung jawab sosial.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini menggunakan variabel tipe industri yang kurang sesuai untuk sampel perusahaan peserta ISRA tahun 2008-2010. Jumlah perusahaan *high profile* dan *low profile* yang menjadi peserta ISRA tahun 2008-2010 tidak seimbang, peserta ISRA lebih didominasi perusahaan *high profile*. Penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh tipe industri terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial disarankan agar

mempertimbangkan keseimbangan jumlah perusahaan *high profile* dan *low profile* yang menjadi peserta ISRA. Penelitian menggunakan variabel tipe industri sebaiknya dilakukan jika tipe industri perusahaan peserta ISRA di tahun-tahun mendatang seimbang.

Penelitian ini mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan pedoman G3. Penelitian selanjutnya disarankan agar mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan pedoman G3.1 dan ISO 26000. ISO 26000 diterbitkan pada tahun 2010 dan pedoman G3.1 diterbitkan pada tahun 2011 sehingga kurang relevan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan peserta ISRA tahun 2008-2010. Perusahaan peserta ISRA menyusun laporan keberlanjutan tahun 2007-2009 berdasarkan pedoman G3 yang diterbitkan tahun 2006. Pada ISRA tahun 2011 dan tahun-tahun selanjutnya diharapkan perusahaan akan menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman G3.1 atau ISO 26000. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan apakah pedoman G3.1 atau ISO 26000 yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan peserta ISRA dalam menentukan informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.

Daftar Rujukan

- Anggraini, Fr.R.R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan: Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Barnea, A., dan A. Rubin. 2005. "Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders". *Journal of Financial Intermediation*. (<http://apps.olin.wustl.edu/jfi/pdf/csr.conflict.pdf>, diakses 16 Agustus 2011).
- Ghozali, I. 2005. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. 2006. Pedoman Laporan Keberlanjutan. Versi 3.0. (<http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines>, diakses 22 September 2011).
- Hidayati, N.N., dan S. Murni. 2009. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Earnings Response Coefficient pada perusahaan High Profile". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 11 (1): hal. 1-18.
- Miranti, L. dan D. Suhardjanto. 2009. "Indonesian Enviromental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 13 (1). (<http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/2240/2042>, diakses 6 September 2011).
- Mirfazli, E. dan Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan Dalam Kelompok Aneka Industri Yang Go Publik di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 12 (1): hal. 1-146.

- Muchlish, M. dan Rawi. 2010. Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Corporate Social Responsibility. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII Banjarmasin.
- National Center for Sustainability Reporting. 2010. 6th Indonesia Sustainability Reporting Award 2010. (<http://www.ncsr-id.org/2010/12/16/announcement-of-the-6th-indonesia-sustainability-reporting-award-isra-2010>, diakses 24 Oktober 2011).
- Nugrahani, T.S. 2009. "Perbedaan Karakteristik Perusahaan High Profile dan Low Profile pada Pengungkapan Sukarela, Tanggung Jawab Sosial, Likuiditas, Solvabilitas, dan Size". *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 3. (<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3094974.pdf>, diakses 6 September 2011).
- Nurkhin, A. 2009. "Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia". Tesis Pascasarjana Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- Rustiarini, N.W. 2010. "Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Sembiring, E.R. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
- Suaryana, A. 2011. "Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 1: hal. 1-26.
- Sukarmi. 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal. (<http://www.djpp.depkmham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>, diakses 5 September 2011).
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (<http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf>, diakses 21 Agustus 2011).

Lampiran 1. Item-item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi	
EC1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
EC7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
Lingkungan	
EN1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.
EN2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang.
EN3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.
EN4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer.
EN5	Total pengambilan air per sumber.
EN11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.
EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi.
EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.
EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.
EN18	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon diperinci berdasarkan berat.
EN20	NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.
EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.
EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.
EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.

EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik kembali menurut kategori.
EN28	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.
Sosial: Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	
LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.
LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
LA13	Komposisi badan pengelola dan perincian karyawan tiap kategori menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
LA14	Rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kategori karyawan.
Sosial: Hak Asasi Manusia	
HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
HR2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diidentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

HR6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Sosial: Masyarakat	
SO1	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
SO2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.
SO3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
SO4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
SO5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
SO8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Sosial: Tanggung Jawab Produk	
PR1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan kode sukarela yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.
PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: Pedoman G3

HALAMAN INI SEGAJA DIKOSONGKAN